

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah mulai direalisasikan pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Tetapi karena kedua Undang-Undang ini sudah tidak relevan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat dalam memperkokoh landasan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Undang-Undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah ini berarti bahwa, Pemerintah Pusat memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan rumah tangganya sendiri dan menggali potensi dan sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang melakukan otonomi. Pemerintah Kabupaten Cirebon ini harus mampu menjalankan rumah tangganya serta harus mampu membiayai segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, karena merupakan sumber utama bagi Pemerintah Daerah dalam membiayai segala kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Daerah ini merupakan penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Untuk penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2005
(dalam Rupiah)

Sumber Pendapatan Daerah	Besar Penerimaan	Persentase
Pendapatan Asli Daerah	79,142,325,851.32	12%
Dana Perimbangan	556,196,623,522.00	88%
Lain-Lain Pendapatan yang sah		
Total	635,338,949,373.32	100%

Sumber: Dipenda Kab. Cirebon (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon masih rendah, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 12 %. Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon ini masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon salah satunya adalah Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2005
(dalam Rupiah)

Sumber PAD	Besar Penerimaan	Persentase
Pajak Daerah	20,624,369,185.00	26%
Retribusi Daerah	53,349,169,186.00	67%
Hasil Prs.Milik daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	983,356,631.00	1,24%
Lain-Lain PAD yang sah	4,185,430,849.32	5,26%
Total PAD	79,142,325,851.32	100%

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaen Cirebon

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten Cirebon pada tahun 2005 merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pos-pos pada Retribusi Daerah itu sendiri terdiri dari berbagai macam Retribusi dan tentu saja memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus merupakan salah satu dari pos-pos yang ada pada Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus ini, petugas Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon berpatokan pada target yang telah disusun sebelumnya. Target ini biasanya sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dijabarkan menjadi target tiap bulan, yang pada umumnya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Target-target yang ditetapkan ini pada pelaksanaan selalu dapat terpenuhi. Ini berarti secara umum tingkat efektivitas pemungutannya baik, namun hal ini akan menjadi pertanyaan jika pada kenyataannya realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan

Persampahan tersebut masih di bawah potensi yang sebenarnya, karena potensi itu sendiri berbeda dengan target.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon, bahwa sebenarnya potensi Retribusi Pelayanan Persampahan khususnya untuk pasar cukup besar dilihat dari jumlah pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu sebanyak 23 pasar. Namun dari 23 pasar yang ada ini hanya 22 pasar yang sudah dipungut Retribusi, dengan alasan satu pasar yang belum dipungut tersebut belum mendapat pelayanan kebersihan.

Dari 23 pasar di Kabupaten Cirebon ini delapan pasar merupakan pasar pemerintah dan sisanya merupakan pasar desa. Masing-masing pasar memberikan kontribusi yang berbeda terhadap penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan. Dari delapan pasar pemerintah ini Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan merupakan pasar yang memberikan hasil penerimaan retribusi lebih besar dari pasar lainnya.

Dari masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis merasa tertarik untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pengelolaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan di Kabupaten Cirebon.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang timbul dan menjadi bahan penelitian adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan di Kabupaten Cirebon.
2. Bagaimana potensi Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan di Kabupaten Cirebon selama tahun 2005 dan 2006.
3. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan di Kabupaten Cirebon selama tahun 2005 dan 2006.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai sejauh mana efektivitas pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan di Kabupaten Cirebon. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme pengelolaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan di Kabupaten Cirebon.
2. Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan di Kabupaten Cirebon.

3. Tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar Pasalaran dan Palimanan di Kabupaten Cirebon.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi temuan ilmiah terhadap ilmu Akuntansi, khususnya Akuntansi Sektor Publik mengenai efektivitas Retribusi Daerah di era Otonomi Daerah.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui dinas Cipta Karya dan DPRD Kabupaten Cirebon mengenai potensi Retribusi Sampah pada Pasar di Kabupaten Cirebon sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam era Otonomi Daerah yang semakin kompetitif ini, setiap daerah harus memiliki kemampuan dalam upaya mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah pada umumnya menjadi tolak ukur keberhasilan Otonomi Daerah.

Menurut Abdul Halim (2004: 67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah ini dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah ini memiliki peranan yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

“Retribusi daerah ini merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan, serta hasil dari penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah” (Marihhot, 2005: 7). Retribusi daerah ini dapat digunakan oleh daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah melalui mekanisme dalam bentuk regulasi tertentu.

Peningkatan Retribusi Daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan Retribusi Daerah diperlukan pengelolaan secara optimal, dimana segala sumber potensi Retribusi Daerah digali, dikembangkan, serta dikelola secara efektif.

Mengingat banyaknya jumlah Pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon, Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar ini dipandang cukup berpotensi dalam peningkatan Retribusi Daerah untuk Kabupaten Cirebon. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus diupayakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar secara efektif. Retribusi Pelayanan Persampahan pada

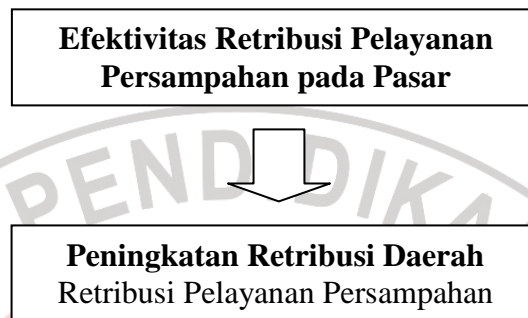
Pasar di Kabupaten Cirebon ini dikelola oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon.

”Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi ”(Mardiasmo, 2004: 132-134).

Ihyaul Ulum (2004:294) mendefinisikan efektivitas sebagai “suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut”.

Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar di Kabupaten Cirebon, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar di Kabupaten Cirebon berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Indikator efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merealisasikan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi efektivitas Retribusi Pelayanan Persampahan pada Pasar maka semakin besar kontribusinya terhadap penerimaan Retribusi Daerah yang akan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan melalui paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.6 Asumsi

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian selama waktu penelitian dan data yang diperoleh adalah data yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kabupaten Cirebon, adapun untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Retribusi Sampah pada Pasar ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon dan Dinas Pasar Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan dalam waktu dua bulan lamanya.